

LAPORAN KINERJA

Biro Manajemen Kinerja,
Organisasi, dan Tata Kelola



**Indonesia Tangguh
Indonesia Tumbuh**

2021

Nomor: LKIN-104/SU01/2/2021
Tanggal: 31 Desember 2021

MKOT
Sehat Berkinerja!



Laporan Kinerja

**Biro Manajemen Kinerja, Organisasi,
dan Tata Kelola**

Tahun 2021

Nomor: LKIN-104/SU01/2/2021
Tanggal: 31 Desember 2021



Nomor : LKIN-104/SU01/2/2021
Hal : Laporan Kinerja Biro MKOT Tahun 2021

31 Desember 2021

Yth.
Sekretaris Utama BPKP
di Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Kinerja Biro MKOT Tahun 2021 sebagai berikut:

I. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama, Biro MKOT memiliki delapan sasaran kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan satu sasaran kegiatan pada Program Pengawasan Pembangunan, yang diukur dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Untuk mewujudkan sasaran kegiatan tersebut, Biro MKOT didukung oleh empat bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi (PPKO), Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), dan Bagian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SPIP dan RB).

Secara umum, capaian kinerja Biro MKOT pada tahun 2021 telah dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan, dengan rata-rata capaian sasaran kegiatan sebesar 100,91%. Capaian ini didukung oleh rata-rata capaian sasaran kegiatan pada Biro MKOT dengan rincian sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 1 "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja" adalah sebesar 106,21%.
2. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 2 "Meningkatnya kualitas pembangunan unit kerja percontohan" adalah sebesar 110,00%.
3. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 3 "Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB" adalah sebesar 96,88%.
4. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 4 "Meningkatnya kualitas penataan tata laksana dan organisasi" adalah sebesar 94,17%.
5. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 5 "Meningkatnya kualitas kesehatan organisasi" adalah sebesar 73,05%.

6. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 6 “Meningkatnya kualitas layanan” adalah sebesar 114,71%.
7. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas pengendalian internal” adalah sebesar 108,47%.
8. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 8 “Meningkatnya kualitas layanan Biro MKOT” adalah sebesar 103,81%.

Selain 8 sasaran kegiatan di atas, terdapat satu tambahan sasaran kegiatan pada Biro MKOT terkait dengan Pengawasan dan Program STAR, yaitu Tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi. Rata-rata capaian sasaran kegiatan tersebut adalah 100,00%.

Walaupun secara umum sasaran kegiatan pada Biro MKOT telah mencapai di atas 100,00% (rata-rata capaian kinerja 9 sasaran kegiatan sebesar 100,81% sedang rata-rata capaian kinerja 8 sasaran kegiatan di luar Program STAR sebesar 100,91%), masih terdapat tiga sasaran kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja di bawah 100%. Sasaran kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja di bawah 100% adalah 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB (96,88%); 2) Meningkatnya kualitas penataan tata laksana dan organisasi (94,17%); dan 3) Meningkatnya kualitas kesehatan organisasi (73,05%). Dengan demikian, perlu direncanakan aksi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja sasaran kegiatan tersebut pada periode tahun depan. Target, realisasi, capaian kinerja kegiatan, dan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 pada Biro MKOT disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Biro MKOT Tahun 2021

No. Urut SK	No. Urut IKK	Kegiatan / Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/5	
Kegiatan: Pembinaan dan koordinasi layanan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola							
1	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja						
	1	IKK : Persentase dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	106,21
	2	IKK: Persentase keselarasan <i>cascading</i> kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00	
	3	IKK: Persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu	Persen	70,00	76,29	108,99	
	4	IKK: Persentase output pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	Persen	70,00	82,76	118,23	
	5	IKK: Persentase ketercapaian target <i>output</i>	Persen	100,00	110,05	110,05	
	6	IKK: persentase laporan kinerja tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	
2	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pembangunan unit kerja percontohan						
	7	IKK 1: Jumlah unit kerja yg diusulkan WBK ke TPN	Unit Kerja	20	24	120	110,00
	8	IKK 1: Jumlah unit kerja yg diusulkan WBBM ke TPN	Unit Kerja	2	2	100	
3	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP						
	9	IKK 1: Persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana	Persen	100,00	96,88	96,88	96,88
4	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi						
	10	IKK 1: Nilai efektivitas struktur	Nilai	81	72,03	88,93	94,17
	11	IKK 2: Nilai efektivitas proses	Nilai	81	80,52	99,41	
5	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas kesehatan organisasi						
	12	IKK 1: <i>Persentase area of improvement</i> yang selesai ditindaklanjuti	Persen	100,00	73,05	73,05	73,05
6	Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya kualitas layanan						
	13	IKK1: Jumlah unit yang meningkat indeks kepuasan layanan BPKP	Jumlah	15	21	140	114,71
	14	IKK 2: Persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti	Persen	85,00	76,00	89,41	
7	Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas pengendalian internal						
	15	IKK 1: Persentase penyelesaian RTP (BPKP dan unit kerja)	Persen	100,00	80,42	80,42	108,47
	16	IKK 2: Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan unit kerja)	Persen	65,00	88,74	136,52	
8	Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya kualitas layanan Biro MKOT						
	17	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT	Skala 10	8,14	8,45	103,81	103,81
Kegiatan MKOT terkait Kegiatan Pengawasan dan Program STAR							
9	Sasaran Kegiatan 9: Tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan Metodologi pengawasan						
	18	Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan intern nasional	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	Tersedianya metodologi pengawasan	Persen	100,00	100,00	100,00	

Capaian kinerja kegiatan Biro MKOT Tahun 2021 diuraikan dan dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja” Biro MKOT pada tahun 2021 adalah sebesar 106,21%. Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja” diukur dengan menggunakan enam IKK yaitu: 1) Persentase dokumen perencanaan tepat waktu; 2) Persentase *cascading* kinerja; 3) Persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu; 4) Persentase *Output* pengawasan yang

dihasilkan tepat waktu; 5) Persentase ketercapaian target *output*; dan 6) Persentase laporan kinerja tepat waktu.

Secara umum, capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja telah didukung oleh seluruh IKK dengan capaian 100,00% dan di atas 100,00%. Capaian masing-masing IKK untuk sasaran kegiatan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Biro MKOT pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja IKK Persentase dokumen perencanaan tepat waktu adalah sebesar 100,00%.
2. Capaian kinerja IKK Persentase *cascading* kinerja adalah sebesar 100,00%.
3. Capaian kinerja IKK Persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu adalah sebesar 108,99%.
4. Capaian kinerja IKK Persentase *Output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu adalah sebesar 118,23%.
5. Capaian kinerja IKK Persentase ketercapaian target *output* adalah sebesar 110,05%.
6. Capaian kinerja IKK Persentase laporan kinerja tepat waktu adalah sebesar 100,00%.

Uraian masing-masing IKK pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

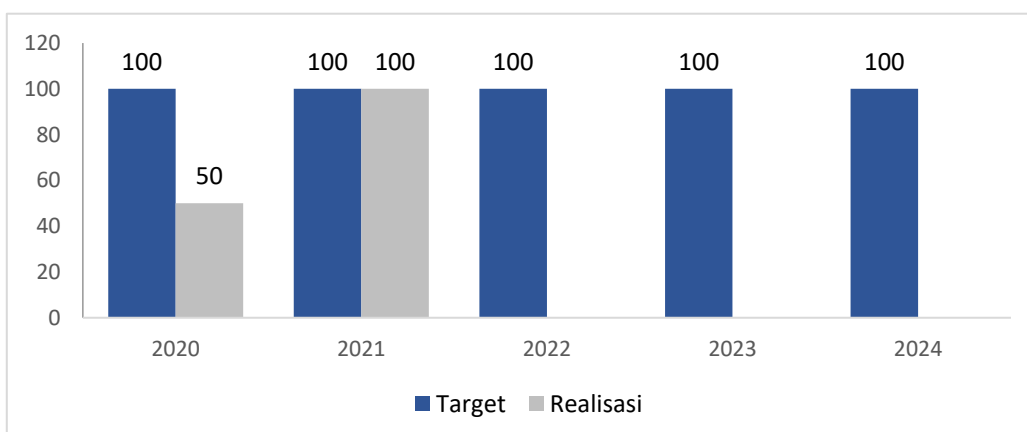
1) Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu

IKK “Persentase dokumen perencanaan tepat waktu” diukur berdasarkan realisasi dokumen perencanaan yang diterbitkan. Capaian kinerja IKK Persentase dokumen perencanaan tepat waktu tahun 2021 pada Biro MKOT adalah sebesar 100,00%, yaitu realisasi sebanyak lima dokumen dari target sebanyak 5 dokumen. Dokumen tersebut adalah:

1. Perjanjian Kinerja (Perkin),
2. Rencana Kinerja,
3. Kebijakan Pengawasan,
4. Kebijakan Teknis Pengawasan, dan
5. Rencana Kerja Tahunan.

Realisasi IKK persentase dokumen perencanaan tepat waktu tahun 2021 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang juga sebesar 100%. Perkembangan target dan realisasi IKK persentase dokumen perencanaan tepat waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pihak eksternal, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran, serta pihak internal yakni Kedeputan selaku Randal, Unit Kerja Perwakilan, Pusat-pusat, Inspektorat, maupun Biro-biro; dan
- b. Mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk peningkatan kualitas manajemen kinerja pengawasan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, Biro MKOT merencanakan aksi atau kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal agar dokumen perencanaan dapat diterbitkan tepat waktu dan valid;
- b. Memperkuat kendali mutu untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

2) Persentase Keselarasan *Cascading* Kinerja

IKK “Persentase keselarasan *cascading* kinerja” diukur berdasarkan jumlah dokumen *cascading* kinerja yang tersusun dibandingkan dengan jumlah *cascading* kinerja yang seharusnya.

Capaian kinerja IKK Persentase keselarasan *cascading* kinerja pada tahun 2021 adalah 100%, yaitu realisasi kinerja sebanyak 6 dokumen *cascading* kinerja Eselon I dari target 6 dokumen. Penyusunan *cascading* mengacu pada Pohon Kinerja BPKP, yang secara garis besar mencakup 6 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran program, yang

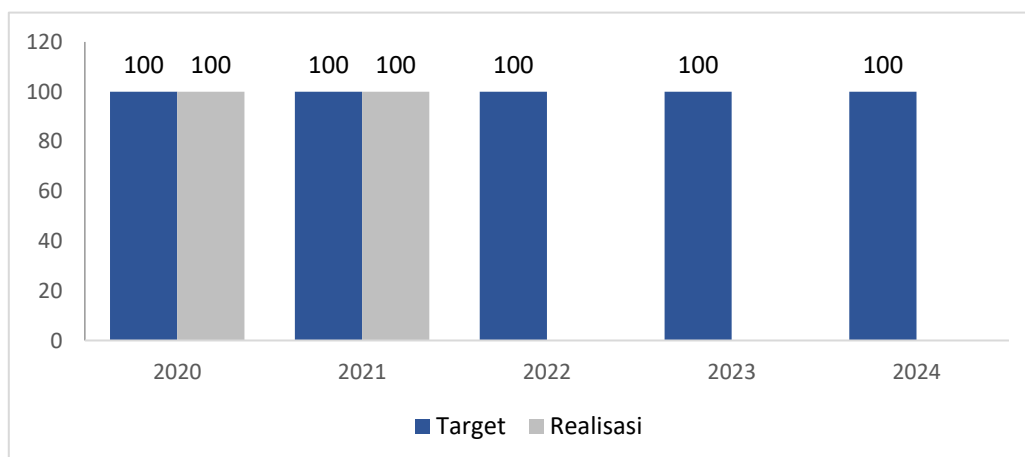
menjadi tanggung jawab masing-masing Deputi Kepala BPKP dengan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Cascading Kinerja Tahun 2021

No.	Uraian	Sasaran Program	IKP
1	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	3	12
2	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	12
3	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	3	9
4	Deputi Bidang Akuntan Negara	5	14
5	Deputi Bidang Investigasi	5	8
6	Sekretariat Utama	6	7

Perbandingan target dan realisasi IKK persentase keselarasan *cascading* kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada Grafik 2.

Grafik 2
Perbandingan Target dan Realisasi
IKK Persentase Keselarasan Cascading Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024



Realisasi persentase keselarasan *cascading* kinerja tahun 2021 telah mencapai 100% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang juga sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah menyusun pohon kinerja sebagai dasar *cascading* kinerja BPKP berkoordinasi dengan unit kerja Kedeputian selaku Rendal, Perwakilan, Pusat-Pusat, Biro-Biro dan Inspektorat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

1. Mengevaluasi ketepatan *cascading* kinerja,
2. Menyusun konvergensi di antara pemangku kepentingan agar tidak terjadi duplikasi aktivitas pengawasan.

3) Persentase Rencana Pelaksanaan Pengawasan yang Tepat Waktu

IKK “Persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu” diukur dengan cara membandingkan realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT yang terbit sesuai dengan rencana mulai penugasan (RMP) dengan jumlah PP PKPT terbit sesuai RMP. IKK ini baru ditargetkan pada tahun 2021. Target IKK Persentase Rencana Pelaksanaan Pengawasan yang Tepat Waktu untuk tahun 2021 adalah 70%.

Capaian kinerja IKK persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 108,88%. Capaian ini diukur berdasarkan perhitungan realisasi IKK persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada tahun 2021 yang sebesar 76,29% dibandingkan dengan target yang sebesar 70%. Realisasi persentase pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 76,29%, yaitu realisasi pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu sebanyak 6.194 pp dari 8.119 pp yang menjadi target (sesuai RMP). Rincian target, realisasi, dan capaian pelaksanaan penugasan PKPT tepat waktu tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.

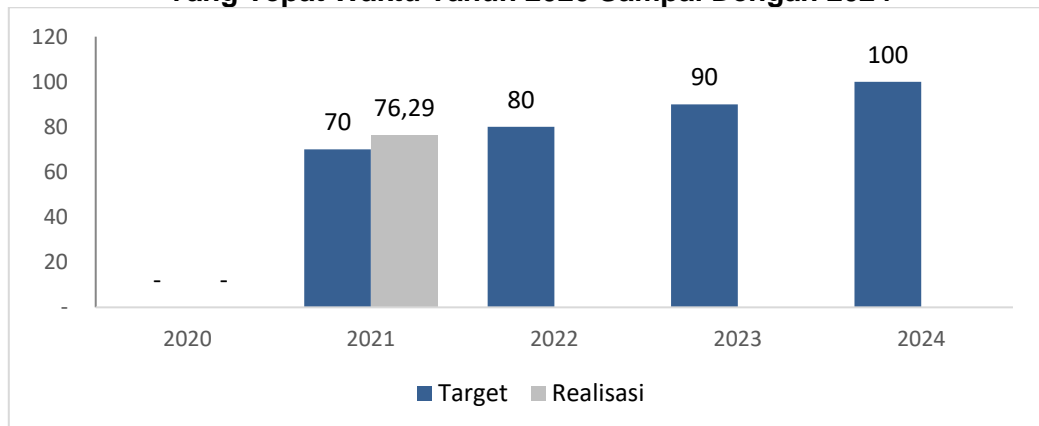
Tabel 3
Target, Realisasi, dan Capaian Pelaksanaan Penugasan Tepat Waktu
Tahun 2021

No.	IKK	Target RO (RKA)	PP	
			Realisasi 2021	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Direktorat	1.362	1.059	77,75
2	Perwakilan	6.757	5.135	76,00
Jumlah		8.119	6.194	76,29

Sumber Data: e-SAKIP per 31 Desember 2021

Realisasi IKK persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu sebesar 76,29% tersebut merupakan 76,29% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 100%. Perbandingan target dan realisasi persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada Grafik 4.

Grafik 4
Target dan Realisasi Persentase Rencana Pelaksanaan Pengawasan Yang Tepat Waktu Tahun 2020 Sampai Dengan 2024



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Mereposisi dan mengaktifkan kembali tim pemangku unit kerja.
- b. Melakukan pemantauan *output* pengawasan dalam aplikasi SIMA dengan mengelompokkan *output* pengawasan yang dihasilkan ke dalam tiga kelompok yaitu: mendahului, secara tepat waktu, dan terlambat berdasarkan RMP.
- c. Menyampaikan atensi hasil pantauan *output* pengawasan dalam aplikasi SIMA ke seluruh unit kerja yang menangani pengawasan.
- d. Melakukan dialog kinerja dengan seluruh unit kerja.

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2021 adalah:

- a. Tersedia *tools* pemantauan yang sangat membantu dalam melakukan pemantauan secara lebih cepat, yaitu aplikasi e-SAKIP.
- b. Tersedia SDM yang memiliki kemampuan mengolah data hasil pemantauan unit kerja.
- c. Evaluasi berkala atas hasil pemantauan para pemangku unit kerja.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensitas pemantauan *output* pengawasan dalam aplikasi SIMA.
- b. Meningkatkan intensitas dialog kinerja.

4) Persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu

IKK "Persentase *Output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu" diukur dengan membandingkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang terbit sesuai dengan rencana penerbitan laporan (RPL) dibagi dengan jumlah LHP terbit. IKK ini baru ditargetkan pada tahun 2021. Target IKK

Persentase *Output* Pengawasan yang Dihasilkan Tepat Waktu untuk tahun 2021 adalah 70%.

Capaian kinerja IKK persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 118,23%. Capaian ini diukur berdasarkan perhitungan realisasi IKK persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu pada tahun 2021 yang sebesar 82,76% dibandingkan dengan target yang sebesar 70%. Realisasi persentase pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 82,76% dihitung berdasarkan realisasi pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu sebanyak 6.719 pp dari 8.119 pp yang menjadi target (sesuai RPL). Rincian target, realisasi, dan capaian *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.

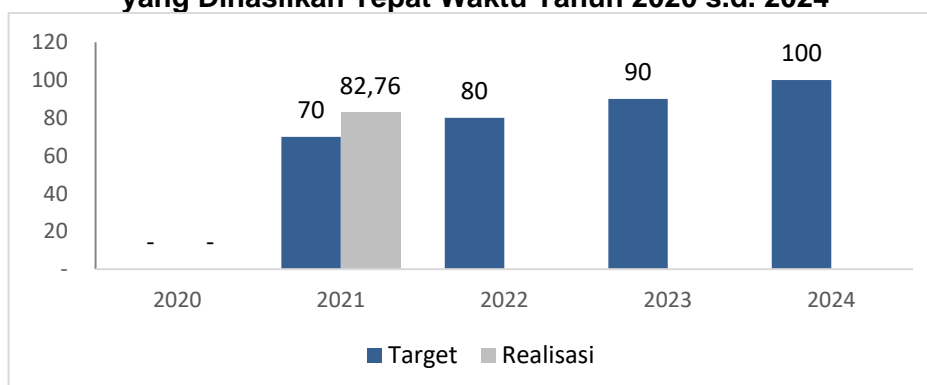
Tabel 4
Target, Realisasi, dan Capaian *Output* Pengawasan
Yang Dihasilkan Tepat Waktu Tahun 2021

No.	IKK	Target RO (RKA)	LHP	
			Realisasi 2021	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Direktorat	1.362	995	73,05
2	Perwakilan	6.757	5.724	84,71
Jumlah		8.119	6.719	82,76

Sumber Data: e-SAKIP per 31 Desember 2021

Realisasi IKK tahun 2021 sebesar 82,76% tersebut merupakan 82,76% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 100%. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, diyakinkan target 2024 akan dapat dicapai. Perbandingan target dan realisasi *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 5.

Grafik 5
Perbandingan Target dan Realisasi *Output* Pengawasan
yang Dihasilkan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber Data: e-SAKIP per 31 Desember 2021

5) Persentase Ketercapaian Target *Output*

IKK “Persentase ketercapaian target *output*” merupakan perwujudan kemampuan BPKP dalam merealisasikan penugasan yang telah direncanakan dalam PKPT. IKK tersebut diukur dengan cara membandingkan antara realisasi laporan atas penugasan pengawasan dengan target *output* tahun 2021.

Capaian kinerja IKK persentase ketercapaian target *output* pada tahun 2021 adalah sebesar 110,05%. Capaian ini diukur berdasarkan perhitungan realisasi IKK persentase ketercapaian target *output* pada tahun 2021 yang sebesar 110,05% dibandingkan dengan target yang sebesar 100%. Realisasi persentase ketercapaian target *output* pada tahun 2021 sebesar 110,05% dihitung berdasarkan realisasi LHP terbit sebanyak 8.935 LHP dari 8.119 LHP yang menjadi target. Rincian target, realisasi, dan capaian ketercapaian *output* BPKP disajikan pada Tabel 5.

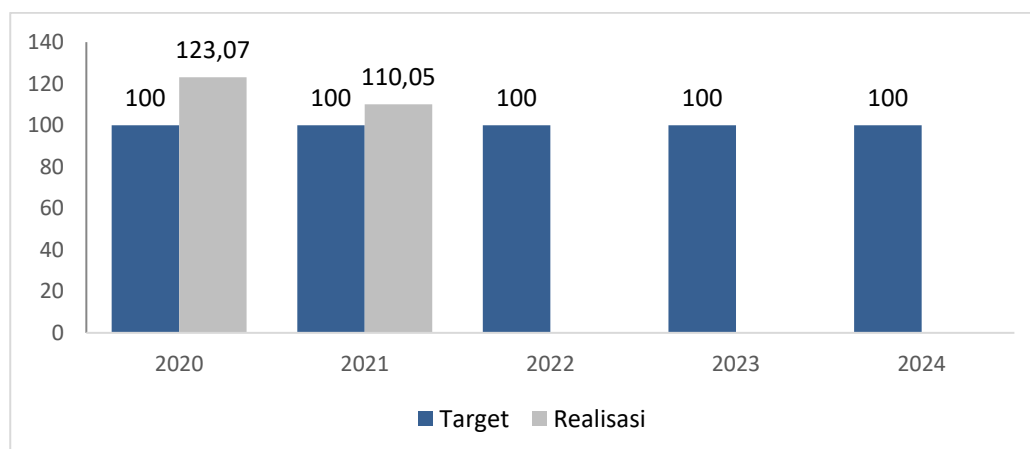
Tabel 5
Target, Realisasi, dan Capaian *Output* BPKP Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Target RO (RKA)	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Direktorat	1.362	1.475	108,30
2	Perwakilan	6.757	7.460	110,40
Jumlah		8.119	8.935	110,05

Sumber Data: e-SAKIP per 31 Desember 2021

Realisasi IKK persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu sebesar 110,05% tersebut merupakan 110,05% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 100%. Perbandingan target dan realisasi *output* BPKP tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 6.

Grafik 6
Perbandingan Target dan Realisasi *Output* BPKP Tahun 2020 s.d. 2024

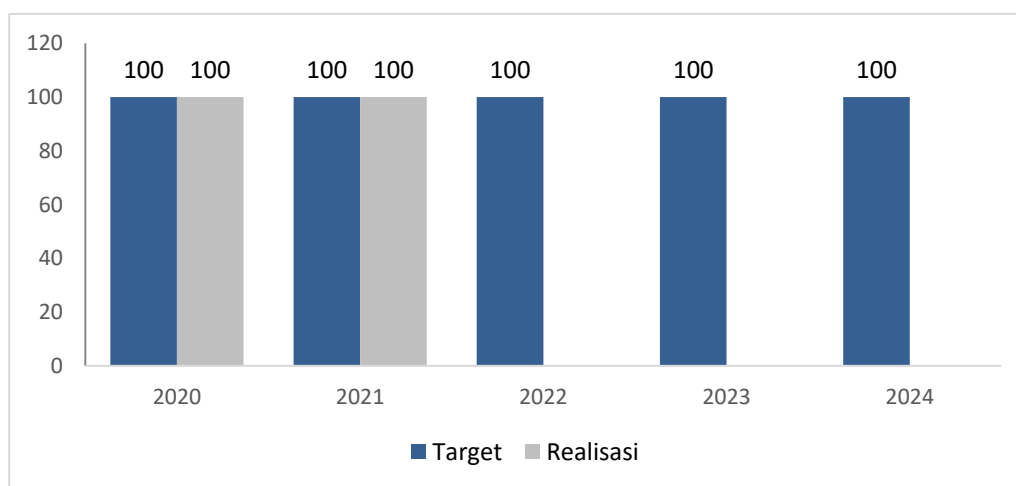


6) Persentase Laporan Kinerja Tepat Waktu

IKK “Persentase laporan kinerja tepat waktu” diukur dengan jumlah realisasi *output* kinerja Bagian PPKO dibandingkan dengan target *output* Bagian PPKO pada tahun yang sama.

Capaian kinerja IKK Persentase laporan kinerja tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Nilai ini didapat dari realisasi laporan kinerja tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 22 laporan atau 100% dari target yang sebanyak 22 laporan. Perbandingan target dan realisasi persentase laporan tepat waktu tahun 2020 s.d. 2021 disajikan pada Grafik 7.

Grafik 7
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2024



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain:

- Koordinasi dengan unit kerja dilaksanakan saat awal rencana penyusunan laporan.
- Menginformasikan atau mengingatkan kembali kepada unit kerja baik melalui *WhatsApp Group* maupun surat edaran untuk meng-*entry* data secara tepat waktu.
- Melengkapi fitur-fitur dalam aplikasi e-SAKIP dalam rangka mempermudah pengambilan data kinerja dari unit kerja.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun 2022, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan intensitas koordinasi perolehan data kinerja dengan unit kerja dan Rendal.
- Meningkatkan kompetensi SDM Bagian PPKO maupun unit kerja terkait penyediaan data kinerja baik melalui diklat, *workshop*, dan PPM.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan” Biro MKOT pada tahun 2021 adalah sebesar 110,00%. Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan” diukur dengan menggunakan dua IKK yaitu: 1) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke Tim Penilai Nasional (TPN); dan 2) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN.

Secara umum, capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pembangunan unit percontohan telah didukung oleh dua IKK dengan capaian 100,00% dan di atas 100%. Capaian masing-masing IKK untuk sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pembangunan unit percontohan Biro MKOT pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

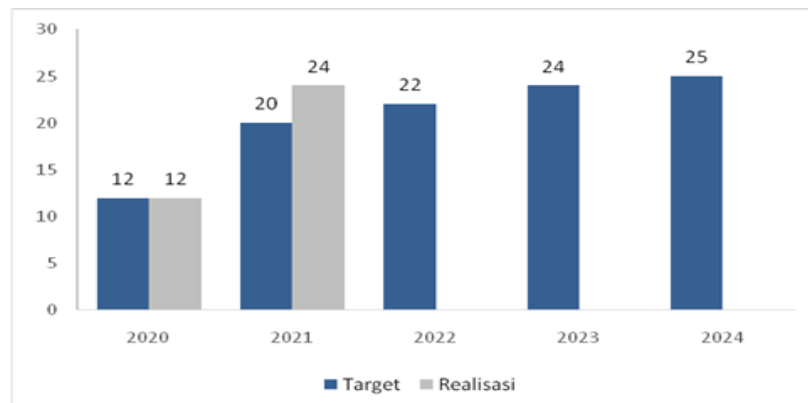
1. Capaian kinerja IKK jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN adalah sebesar 120,00%.
2. Capaian kinerja IKK Jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN adalah sebesar 100,00%.

Uraian masing-masing IKK pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pembangunan unit percontohan adalah sebagai berikut:

1) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN

Capaian IKK Jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN tahun 2021 adalah sebesar 120%. Capaian) IKK tersebut dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang diusulkan ke TPN sebanyak 24 unit kerja dari target 20 unit kerja. Perbandingan target dan realisasi jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 8.

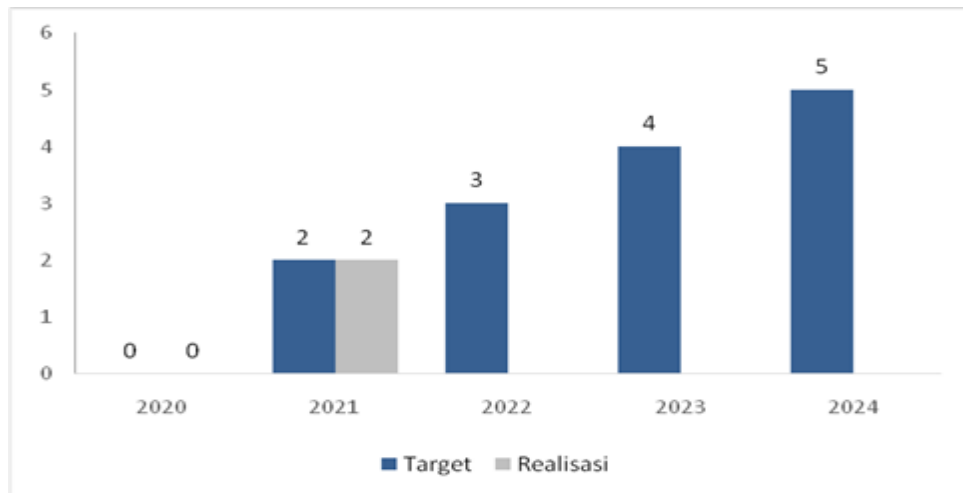
Grafik 8
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Unit Kerja Yang Diusulkan WBK Tahun 2020 s.d. 2024



2) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN

Capaian KK “Jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN” tahun 2021 adalah sebesar 100%. Capaian IKK tersebut dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang diusulkan ke TPN sebanyak dua unit kerja dari target tahun 2021 sebanyak dua unit kerja. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Grafik 9.

Grafik 9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024



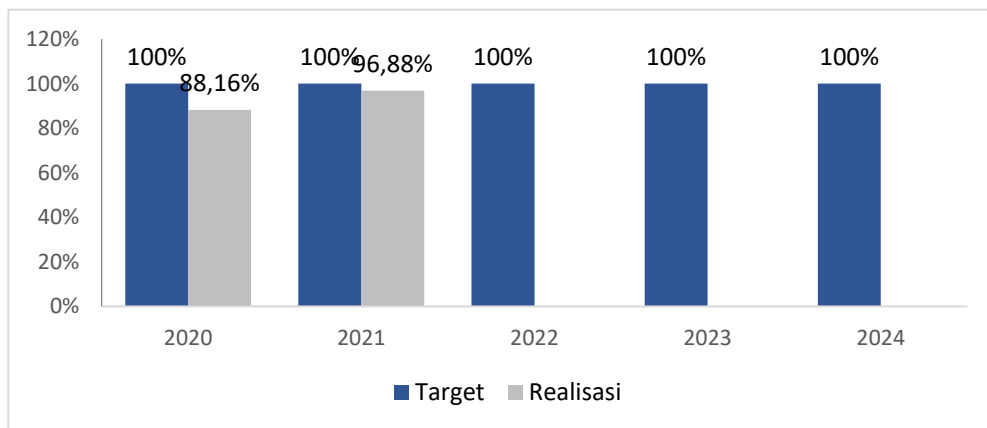
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan analisis atas *self assessment* Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan analisis bukti pendukung ZI (WBK/WBBM) unit kerja.
- Melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap persiapan unit kerja dalam rangka menuju WBK/WBBM.
- Bagian SPIP dan RB menjadi narasumber dalam acara workshop/ sosialisasi/PPM terkait Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh unit kerja.
- Melakukan pembahasan draft Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dengan Kepala BPKP.
- Melakukan kegiatan analisis atas *self assessment* ZI menuju WBK/WBBM dan analisis bukti pendukung ZI (WBK/WBBM) unit kerja;
- Melakukan pendampingan terhadap unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- Melakukan koordinasi dengan KemenPAN dan RB dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja sebagai komponen ZI menuju WBK/WBBM.

3. Sasaran Kegiatan: meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP tahun 2021 adalah sebesar 96,88%. Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP diukur dengan satu IKK, yaitu “Persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana”. Capaian IKK tersebut sebesar 96,88%. Capaian IKK tersebut dihitung berdasarkan jumlah realisasi aksi RB BPKP dari periode tahun 2020 s.d. 2021 sebanyak 155 dibandingkan dengan jumlah rencana aksi RB BPKP dari periode tahun 2020 s.d. 2021 sebanyak 160. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 10.

Grafik 10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Rencana Aksi RB Tahunan Yang Terlaksana Tahun 2020 s.d. 2024



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja RB setiap semester guna memastikan implementasi RB BPKP berjalan dengan efektif.
- Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja kepada unit kerja dalam rangka mendorong implementasi RB.
- Pembentukan Agen Perubahan di setiap unit kerja BPKP dalam rangka menggerakkan unit kerja untuk melakukan perubahan sehingga dapat lebih efektif mempercepat implementasi RB.
- Mendorong pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, terutama unit kerja perwakilan, sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB BPKP secara menyeluruh.

Rencana tindak untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- Mendorong pembangunan zona integritas pada unit kerja terutama unit kerja perwakilan sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi BPKP secara menyeluruh.

- b. Menyelesaikan peraturan BPKP tentang Pembangunan Zona Integritas untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga dapat mendorong percepatan implementasi RB BPKP.
- c. Menyelesaikan peraturan BPKP tentang Pedoman Budaya Kerja untuk mempercepat keberhasilan pola pikir dan budaya kerja aparatur di lingkungan BPKP yang disesuaikan dengan dinamika reformasi birokrasi.
- d. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait anggaran yang perlu disediakan dalam rangka membangun pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat instansi maupun unit kerja.
- e. Mengikutsertakan agen perubahan dan tim ZI unit kerja untuk mengikuti kegiatan pelatihan/diklat/workshop tentang Reformasi Birokrasi.

4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi

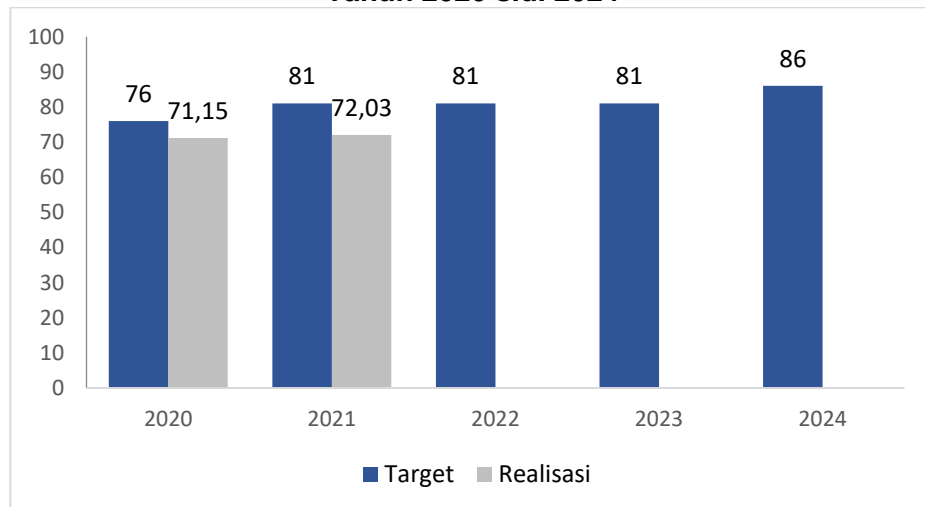
Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi tahun 2021 adalah sebesar 94,17%. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi” diukur dengan dua IKK, yaitu nilai efektivitas struktur dan nilai efektivitas proses, dengan uraian sebagai berikut:

1) Nilai Efektivitas Struktur

Capaian IKK Nilai efektivitas struktur tahun 2021 adalah sebesar 88,93%. IKK Nilai efektivitas struktur diukur melalui survei dengan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur organisasi. Realisasi IKK ini pada tahun 2021 adalah sebesar 72,03 atau 88,93% dari target tahun 2021 yang sebesar 81.

Hasil Evaluasi Efektivitas Struktur menunjukkan skor sebesar 72,03 atau berada pada peringkat komposit 4 (P4) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa organisasi tergolong efektif ditinjau dari sisi struktur. Perbandingan target dan realisasi kinerja IKK nilai efektivitas struktur tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 11.

Grafik 11
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Efektivitas Struktur
Tahun 2020 s.d. 2024



Realisasi Nilai Efektivitas Struktur tahun 2021 adalah sebesar 72,03 atau mencapai 83,76% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 86.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- b. Internalisasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pascapenyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- c. Finalisasi Draf Peraturan BPKP Penyederhanaan Birokrasi.
- d. Finalisasi Draf Keputusan Kepala BPKP tentang Tunjangan Kinerja Pascapenyetaraan.
- e. Finalisasi Draf Keputusan Kepala BPKP tentang Peta Jabatan dan Hasil Perhitungan Formasi Tahun 2021.
- f. Pembaruan Peta Jabatan di Lingkungan BPKP.
- g. Penyesuaian Informasi Jabatan-Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
- h. Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Penerapan Pola Penugasan, Pola Pembinaan dan Wewenang Penyusunan Naskah Dinas Jabatan Fungsional Selaku Koordinator dan Subkoordinator.
- i. Hasil Analisis Beban Kerja Pelaksanaan APP Tahun 2021.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Percepatan pengesahan draf peraturan yang berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan BPKP.

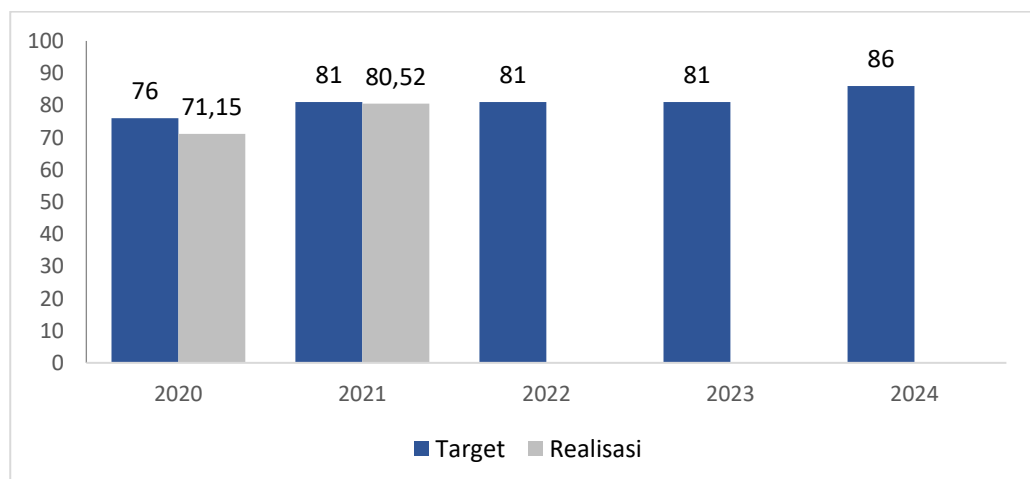
- b. Evaluasi peraturan yang berkaitan dengan kebutuhan jenjang jabatan dan formasi jabatan di lingkungan BPKP.
- c. Pemantauan pemenuhan kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan BPKP sesuai dengan Peta Jabatan.
- d. Evaluasi dan merevisi peraturan yang berkaitan dengan informasi jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPKP.
- e. Mengevaluasi dan menganalisa kembali peraturan BPKP yang berkaitan dengan pola hubungan antar JPT, JA, JF dan JP di lingkungan BPKP.

2) Nilai Efektivitas Proses

Capaian kinerja IKK Nilai Efektivitas Proses tahun 2021 adalah sebesar 99,41%. IKK “nilai efektivitas proses” diukur melalui survei dengan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi proses organisasi. Kuesioner ini diisi oleh 53 responden yang mewakili Unit Kerja di lingkungan BPKP, yaitu Sekretariat Utama, Kedeputan, Inspektorat, Pusat-Pusat, dan seluruh Perwakilan. Realisasi IKK ini pada tahun 2021 adalah sebesar 80,52 atau mencapai 99,41% dari target tahun 2021 yang sebesar 81.

Hasil Nilai Efektivitas Proses menunjukkan skor sebesar 80,52 atau berada pada peringkat komposit 5 (P-5) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa organisasi tergolong sangat efektif ditinjau dari sisi proses. Perbandingan target dan realisasi kinerja IKK nilai efektivitas proses tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 12.

Grafik 12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Efektivitas Proses Tahun 2020 s.d. 2024



Realisasi IKK Nilai Efektivitas Proses tahun 2021 yang sebesar 80,52 merupakan 93,63% dari target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 86.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

1. Internalisasi Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis dan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Baku Pelaksanaan Kegiatan.
2. Koordinasi Digitalisasi Arsip.
3. Perencanaan dan pengendalian Penyusunan SOP atas seluruh proses bisnis BPKP menuju transformasi digital.
4. Penyusunan Prosedur Baku Fungsi Tata Kelola.
5. Pelaksanaan Validasi SOP.
6. Pengembangan Aplikasi "E-TOP".
7. Penyusunan Draf Revisi Pedoman Tata Naskah.
8. Pelaksanaan Evaluasi, Inventarisasi, Pemetaan Pedoman Agenda Prioritas Pengawasan (APP).
9. Penyempurnaan Peta Proses Bisnis.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempercepat pelaksanaan validasi SOP.
- b. Mengawal dan mendorong penyusunan prosedur kerja.
- c. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas aplikasi E-TOP dengan menambahkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna akhir aplikasi E-TOP.
- d. Menyusun revisi Pedoman Penyusunan Pedoman.

5. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi

Rata-rata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi tahun 2021 adalah 73,05%. Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi" diukur dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu persentase *area of improvement* yang selesai ditindaklanjuti. Target IKK ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Tujuan pengukuran Indeks Kesehatan Organisasi BPKP (IKO BPKP) adalah untuk mendapatkan informasi tentang situasi internal (nilai faktor-faktor kesehatan) yang ada di tubuh BPKP. Indeks pengukuran kesehatan ini mencermati kondisi dari 9 dimensi, yang masing-masing memiliki indikator sebagai cerminan tingkat kesehatan organisasi. Kesembilan dimensi tersebut adalah: 1) Koordinasi dan Pengendalian, 2) Motivasi, 3) Akuntabilitas,

4) Kapabilitas, 5) Arahkan, 6) Kepemimpinan, 7) Budaya dan Iklim Kerja, 8) Orientasi Eksternal, dan 9) Inovasi & Pembelajaran.

Secara keseluruhan, survei IKO tahun 2021 menghasilkan skor tingkat kesehatan organisasi sebesar 73,05 atau 73,05% dari target tahun 2021. Nilai ini merupakan 73,05% dari target pada akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 100%. Terhadap hasil survei tersebut, tim IKO BPKP akan melakukan telaahan lebih lanjut untuk menghasilkan beberapa area perbaikan, baik yang bersifat universal bagi keseluruhan lingkup BPKP maupun kontekstual di beberapa unit kerja. Telaahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan diskusi terfokus, yang akan dilakukan di awal tahun 2022.

6. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan tahun 2021 adalah 114,71%. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan” memiliki dua Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu 1) jumlah unit yang meningkat indeks kepuasan layanan BPKP dan 2) persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti. Capaian masing-masing IKK adalah 140% dan 89,41%. Uraian masing-masing IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Unit yang meningkat Indeks Kepuasan Layanan BPKP

Capaian kinerja IKK Jumlah Unit yang Meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan BPKP pada tahun 2021 adalah 140%. Nilai tersebut diperoleh dari realisasi IKK Jumlah Unit yang meningkat Indeks Kepuasan Layanan BPKP tahun 2021 sebanyak 21 Unit Kerja dibagi dengan target tahun 2021 yang sebanyak 15 Unit Kerja.

Sebanyak 21 Unit Kerja yang meningkat Indeks Kepuasan Layannya merupakan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM. Unit kerja tersebut telah mendapat penilaian dari Kementerian PAN dan RB melalui Desk Evaluation. Dari 24 unit kerja yang diusulkan, terdapat 21 unit kerja yang indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publiknya baik sehingga dapat lanjut ke tahap Desk Evaluation.

Terlampauinya IKK tersebut didukung upaya-upaya berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik;
- b. Mensosialisasikan Budaya Pelayanan Prima pada setiap rapat koordinasi dengan unit kerja;
- c. Mendampingi unit kerja dalam penentuan *customer list survey* persepsi pelayanan publik pada PMPZI; dan

- d. Menjadi narasumber PPM mengenai budaya pelayanan prima di beberapa Unit Kerja.

2) Persentase Rekomendasi Perbaikan yang Ditindaklanjuti

Capaian kinerja IKK Persentase Rekomendasi Perbaikan yang Ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah sebesar 89,41%. IKK ini diukur dengan membandingkan jumlah persentase rekomendasi dari KemenPAN RB yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi dari KemenPANRB yang harus ditindaklanjuti. Target indikator persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti tahun 2021 adalah sebesar 85%.

Berdasarkan Surat dari Menteri PANRB Nomor B/28/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, terdapat 5 rekomendasi dari KemenPanRB yang harus ditindaklanjuti. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah sebesar 76% atau mencapai 89,41% dari target 85%. Uraian tindak lanjut atas rekomendasi KemenPANRB disajikan dalam Tabel 6

Tabel 6
Capaian Persentase Rekomendasi dari KemenpanRB yang Telah Ditindaklanjuti

No	Rekomendasi	%
1	Melakukan reuiu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja hingga ke level jabatan terendah, dengan memperhatikan logical framework yang dibangun dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	85%
2	Melakukan analisis yang memadai pada setiap target yang ditetapkan sehingga tingkat ketercapaiannya dapat diyakini dengan memperhatikan target kinerja dan capaian kinerja pada akhir periode rencana strategis pada indikator kinerja yang sama, serta memperhatikan program prioritas pada RPJMN	70%
3	Mendorong pengelolaan manajemen kinerja secara berjenjang dari level pimpinan sampai ke individu melalui sistem informasi yang dapat mengakomodir pengelolaan kinerja bulanan/triwulan, sehingga selaras dengan pemberian tunjangan kinerja yang berdasar capaian kinerja individu;	50%
4	Mendorong upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau crosscutting secara optimal pada setiap unit kerja, dengan memperhatikan aspek kolaborasi antar unit kerja untuk mencapai kinerja organisasi;	85%
5	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar hasil dan rekomendasi evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi secara berkelanjutan.	90%
	Rata-Rata Kemajuan TL	76%

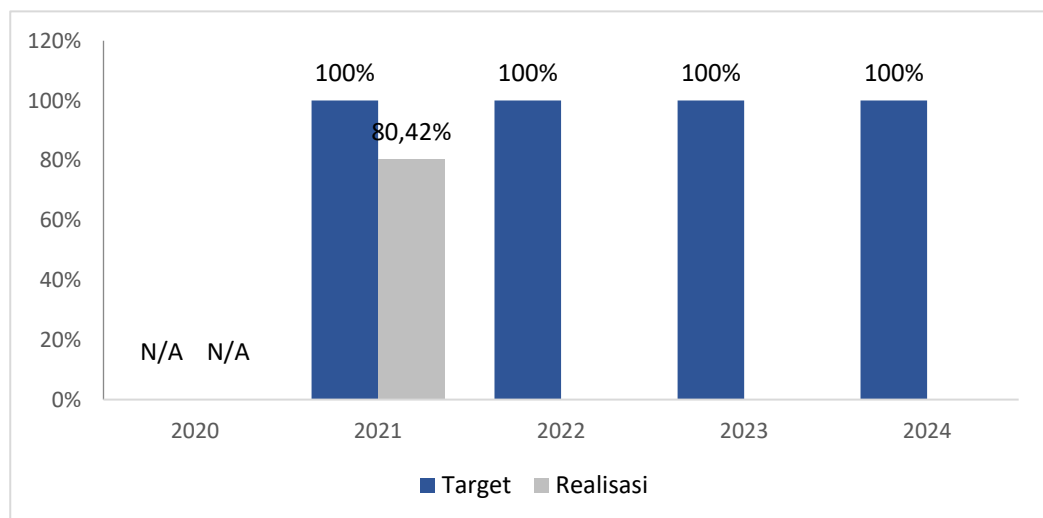
7. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern.

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern tahun 2021 adalah sebesar 108,47%. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengendalian internal” memiliki dua IKK, yaitu 1) persentase penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja) dan 2) persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan Unit Kerja). Capaian kinerja masing-masing IKK tersebut adalah 80,42% dan 136,52%. Uraian masing-masing IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase penyelesaian RTP (BPKP dan unit kerja)

Capaian kinerja IKK Persentase penyelesaian RTP (BPKP dan unit kerja) tahun 2021 adalah 80,42%. IKK “Persentase Penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja)” diukur dengan membandingkan jumlah RTP yang terealisasi tahun 2021 dengan RTP yang terjadwal pada tahun 2021. Realisasi penyelesaian RTP (BPKP dan unit kerja) tahun 2021 adalah sebanyak 957 sedang jumlah RTP yang terjadwal pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.190. Dengan demikian, persentase penyelesaian RTP tahun 2021 adalah sebesar 80,42%. Capaian IKK ini pada tahun 2021 juga 80,42% dari target 100%. Perbandingan target dan realisasi kinerja persentase penyelesaian RTP (BPKP dan unit kerja) tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 13.

Grafik 13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja) Tahun 2020 s.d. 2024

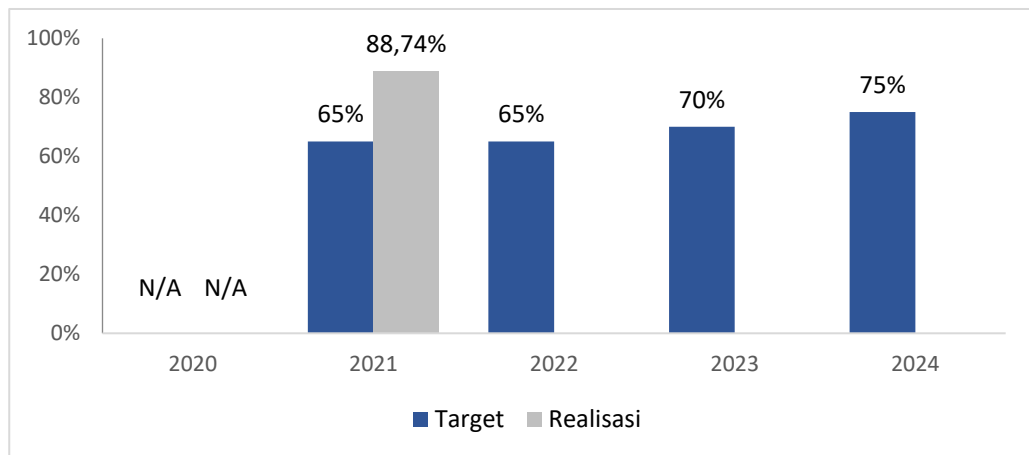


Capaian kinerja Persentase Penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja) sebesar 80,42% juga merupakan 80,42% target Renstra tahun 2024 yang sebesar 100%.

2) Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan unit kerja)

Capaian IKK Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan Unit kerja) tahun 2021 sebesar 136,52%. Capaian IKK tersebut dihitung dari persentase jumlah risiko yang termitigasi tahun 2021 dibandingkan dengan persentase jumlah risiko yang teridentifikasi tahun 2021. Persentase jumlah risiko yang termitigasi tahun 2021 adalah sebesar 88,74%. Nilai ini dihitung dari jumlah risiko yang termitigasi tahun 2021 sebanyak 1.631 dibagi dengan jumlah risiko yang teridentifikasi tahun 2021 sebanyak 1.838. Target persentase jumlah risiko yang teridentifikasi termitigasi tahun 2021 adalah sebesar 65%. Dengan demikian, capaian IKK Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan Unit Kerja) tahun 2021 adalah 136,52%, yaitu realisasi 88,74% dari target 65%. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 14.

Grafik 14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (BPKP dan Unit Kerja) Tahun 2020 s.d. 2024



Terlampauinya target IKK tersebut didukung dengan kondisi/upaya-upaya berikut:

- Pengembangan dan sosialisasi aplikasi manajemen risiko (BeWise) dengan menggali masukan dari unit kerja.
- Pemantauan atas realisasi RTP yang disusun oleh unit kerja.
- Komitmen pimpinan BPKP yang menyadari bahwa BPKP sebagai pembina SPIP harus menjadi contoh terbaik (*best practice*) dalam penyelenggaraan SPIP, termasuk manajemen risiko, sehingga implementasi manajemen risiko dilaksanakan dengan serius dan efektif.
- Banyaknya pegawai BPKP yang telah mengikuti pelatihan manajemen risiko dan memiliki sertifikasi manajemen risiko (CRMP, CRMO, dan sebagainya).

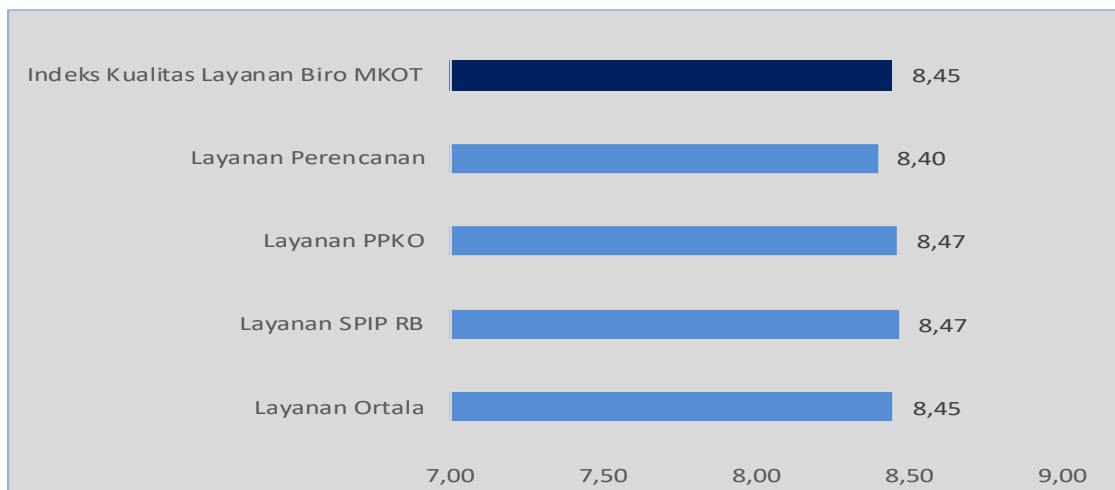
8. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Biro MKOT

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Biro MKOT tahun 2021 adalah sebesar 103,81%. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Biro MKOT” memiliki satu indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT. IKK ini diukur dengan metode persepsi pelayanan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran dirancang dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kualitas/mutu layanan yang berorientasi hasil
- 2) Ketepatan waktu
- 3) Integritas Pelayanan
- 4) Penanganan pengaduan
- 5) Sarana dan prasarana
- 6) Prosedur
- 7) Etika pelayanan
- 8) Kompetensi petugas
- 9) Metode Pelayanan
- 10) Inovasi

Realisasi IKK Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT tahun 2021 adalah 8,45. Nilai ini merupakan 103,81% dari target skor 8,14. Rincian skor setiap jenis layanan pada Biro MKOT disajikan pada Grafik 15.

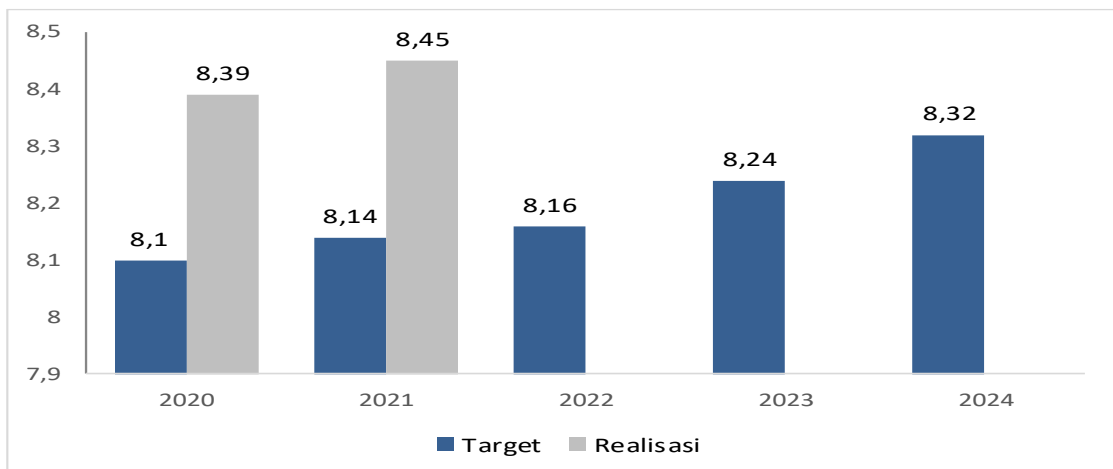
Grafik 15
Persepsi Kepuasan Per Jenis Layanan
Tahun 2021



Meskipun nilai akhir indeks sudah baik dan melampaui target tahun 2021, masih terdapat skor rata-rata masing-masing pernyataan yang berada di bawah target 8,14, yaitu atas pernyataan:

- 1) Perencanaan telah disusun tepat waktu (skor rata-rata 7,76).
 - 2) Prosedur penyusunan perencanaan jelas dan mudah (skor rata-rata 8,07).
- Perbandingan target dan realisasi kinerja Indeks Kualitas Layanan MKOT tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 16.

Grafik 16
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Layanan MKOT
Tahun 2020 s.d. 2024



Realisasi indeks layanan Biro MKOT tahun 2021 sebesar 8,45 ini lebih tinggi 0,06 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 8,39. Capaian tahun 2021 ini merupakan 101,56% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 8,32.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM Biro MKOT melalui *workshop*, diklat, maupun PPM.
- 2) Mengembangkan aplikasi yang telah ada dengan menambahkan fitur-fitur yang mempermudah unit kerja melaporkan kinerjanya seperti e-SAKIP, BeWise.
- 3) Menyusun manual pengoperasian aplikasi seperti manual pengoperasian e-SAKIP.
- 4) Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan maupun manual aplikasi di Biro MKOT seperti petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja eselon 1 maupun eselon 2 tahun 2021.
- 5) Membuka dialog kinerja via zoom.

Faktor pendukung keberhasilan layanan pada Biro MKOT antara lain:

- 1) Semakin intensifnya koordinasi dan komunikasi dengan seluruh unit kerja dan rendal di lingkungan BPKP, baik secara langsung maupun melalui *WhatsApp Group* dan *online*.
- 2) Pegawai Biro MKOT responsif dalam menanggapi permasalahan yang dikemukakan oleh unit kerja.
- 3) Tersedianya *tools* yang memadai seperti e-SAKIP, BeWise

Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan di tahun 2022 antara lain:

- 1) Terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai baik melalui diklat teknis substansi, *workshop*, maupun PKS terkait pekerjaan sehari-hari.
- 2) Menyempurnakan aplikasi e-SAKIP, SIMA, dan aplikasi terkait lainnya dalam rangka mempermudah unit kerja dalam melaporkan data kinerja.

9. Sasaran Kegiatan: Tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sasaran Kegiatan "Tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan" memiliki dua IKK, yaitu 1) tersedianya dokumen kebijakan pengawasan intern nasional dan 2) tersedianya metodologi pengawasan. Capaian masing-masing IKK tersebut pada tahun 2021 adalah masing-masing 100%. Uraian masing-masing IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya Dokumen kebijakan pengawasan intern nasional

Capaian kinerja IKK Tersedianya Dokumen Kebijakan pengawasan Intern Nasional tahun 2021 adalah sebesar 100%. BPKP telah menyusun 61 Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dengan tema "Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi" dan 67 Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Agenda pengawasan memprioritaskan 15 (lima belas) isu strategis di tingkat pusat, diantaranya adalah percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pengawasan akuntabilitas keuangan Negara dan daerah, tata kelola Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha serta pengawasan secara tematik atas sektor/program yang menjadi perhatian *stakeholders* yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan energi.

Selain itu, BPKP juga memprioritaskan 12 (dua belas) isu strategis daerah, diantaranya melaksanakan evaluasi dan pendampingan atas 5 sektor strategis pembangunan daerah yaitu: pendidikan, kesehatan, pengentasan

kemiskinan, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah. APP dan APPD merupakan peta acuan strategis bagi BPKP dan *stakeholders* dalam keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern pemerintah tahun 2021. Untuk menjaga ketercapaian APP dan APPD, BPKP telah melakukan konvergensi pengawasan yang terdiri dari Unit Kerja Penanggung Jawab, Unit Kerja Kontributor level Kedeputan dan Perwakilan BPKP. Dalam APPD, juga sudah dilakukan penunjukan penanggung jawab dan unit kerja yang menjadi kolaboratornya.

2) Tersedianya metodologi pengawasan

Capaian kinerja IKK Tersedianya metodologi pengawasan tahun 2021 adalah sebesar 100%. Metodologi pengawasan yang handal diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja BPKP. Untuk itu, perlu dilakukan Koordinasi Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan yang melibatkan Direktorat Perencanaan (PAEP) maupun Unit Rendal Kedeputan. Dalam mendukung tersedianya metodologi pengawasan BPKP, akan dilaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri (*STAR Additional Financing*).

Untuk menjaga kualitas hasil/informasi yang diharapkan, BPKP perlu menyusun metodologi pengawasan atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan prioritas pengawasan;
- b. Proses perencanaan atas sektor, tema, dan topik;
- c. Proses penganggaran;
- d. Proses pelaksanaan;
- e. Proses kompilasi dan sintesa pelaporan;
- f. Proses monitoring dan tindak lanjut; serta
- g. Pola hubungan antar unit dalam menghasilkan laporan *stakeholders* (Presiden, Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan *stakeholders* lainnya).

Metodologi pengawasan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholders*, khususnya *stakeholder* utama yaitu Presiden RI. Dalam hal pengembangan Metodologi Pengawasan, BPKP mempunyai proyek-proyek yang dibiayai oleh *STAR-Additional Financing*. Sekreatris Utama BPKP merupakan *Executing Agency* dan penanggung jawab STAR-AF, sedang Kepala Biro sebagai Ketua PMU. STAR-AF mempunyai *ultimate outcome* sebagai berikut:

1. Opini WTP untuk K/L/P
2. Level 3 Maturitas SPIP K/L/P
3. Level 3 Kapabilitas APIP K/L/P

II. Output Kegiatan

Capaian Kinerja output Kegiatan Biro MKOT tahun 2021 mencapai 100%, yaitu realisasi 39 dari target 39 *output*. Rincian capaian *output* kegiatan Biro MKOT tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Capaian Output Kegiatan Biro MKOT
Tahun 2021

No.	Rincian Output (RO)	Kinerja Output			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Layanan Perkantoran Biro MKOT	Layanan	1	1	100
2	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	100
3	Layanan Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi	Laporan	22	22	100
4	Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Layanan	1	1	100
5	Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi	Layanan	1	1	100
6	Koordinasi Kebijakan Pengawasan Nasional	Laporan Koordinasi	1	1	100
6	Koordinasi atas Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengawasan	Laporan Koordinasi	4	4	100
7	Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	Laporan Koordinasi	4	4	100
8	Pengembangan Kapasitas APIP dan PKN	Laporan	1	1	100
9	Kompetensi dan Kebutuhan Institusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	Laporan	2	2	100
10	<i>Project Management and Supporting</i>	Laporan	1	1	100
	Jumlah		39	39	100

Capaian kinerja *output* kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran Biro MKOT

Realisasi capaian layanan perkantoran Biro MKOT tahun 2021 adalah sebanyak satu layanan atau mencapai 100% dari target tahun 2021 yang sebanyak 1 layanan. *Output* tersebut dicapai melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

2. Layanan Perencanaan

Realisasi capaian layanan perencanaan tahun 2021 adalah sebanyak satu layanan atau 100% dari target tahun 2021 yang sebesar 1 layanan. *Output* tersebut dicapai dengan beberapa kegiatan, seperti rapat koordinasi, pembahasan dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan unit-unit kerja, yang menghasilkan lima dokumen perencanaan yaitu dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Kebijakan Pengawasan, Kebijakan Teknis Pengawasan, dan Rencana Kerja Tahunan.

3. Layanan Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi

Capaian kinerja output Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi *output* layanan pemantauan dan pelaporan kinerja organisasi tahun 2021 adalah sebanyak 22 laporan atau mencapai 100% dari target tahun 2021 yang sebesar 22 laporan. Rincian realisasi *output* tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) LKj Sekretariat Utama Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Triwulan I, II, dan III Tahun 2021 (4 Laporan).
- 2) LKj BPKP Tahun 2020 dan Laporan Kinerja BPKP Triwulan I, II, dan III Tahun 2021 (4 Laporan).
- 3) Laporan Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP39/2006 BPKP Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II, dan III Tahun 2021 (4 Laporan).
- 4) Laporan Monitoring Capaian Kinerja pada aplikasi SIMA, e-Sakip dan E-Monev PP39 s.d Bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan November Tahun 2021 (8 Laporan).
- 5) Analisis Bahan lampiran Pidato Presiden.
- 6) Analisis Nota Keuangan.

4. Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana

Capaian kinerja output layanan manajemen organisasi dan tata laksana tahun 2021 adalah 100%. Realisasi capaian layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana tahun 2021 adalah sebanyak satu layanan atau 100% dari target tahun 2021 yang sebanyak satu layanan. *Output* tersebut dicapai dengan beberapa kegiatan layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana yang dikelompokkan dalam dua Indikator *Output* Kegiatan (IOK) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penataan dan Evaluasi Organisasi, Analisis dan Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja dengan target 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala BPKP tentang Tunjangan Kinerja dan Kelas Jabatan Pascapenyetaraan;
 - b. Peraturan BPKP tentang SOTK BPKP dan Perwakilan BPKP;
 - c. Surat Edaran (SE) Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-2/SU/01/2021 tentang Penerapan Pola Penugasan, Pola Pembinaan, dan Wewenang Penyusunan Naskah Dinas Jabatan Fungsional Selaku Koordinator dan Subkoordinator;
 - d. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-7/SU/01/2021 tentang Penerapan Pola Penugasan, Pola Pembinaan dan Wewenang Penyusunan Naskah Dinas Jabatan Fungsional Selaku Koordinator dan Subkoordinator;

- e. Keputusan Kepala Nomor KEP-296/K/SU/2021 tentang Peta Jabatan dan Hasil Perhitungan Formasi Pegawai di Lingkungan BPKP Tahun 2021.
 - f. Surat Kepala BPKP Nomor S-715/K/SU/2021 kepada MenpanRB tentang Validasi Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan BPKP.
 - g. Surat Usulan penyetaraan jabatan tahap II untuk sejumlah 36 (tiga puluh enam) pejabat pengawas eselon IV kepada KemenPANRB Nomor S-694/K/SU/2021 tanggal 16 Juni 2021 Hal Hasil Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi dalam rangka Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
 - h. Perban Uraian Fungsi dan Pola Hubungan Organisasi dan Pola Hubungan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Koordinator, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan BPKP.
 - i. Hasil Analisis Beban Kerja Pelaksanaan APP Tahun 2021.
- 2) Penataan dan Evaluasi Proses Bisnis dan Prosedur Kerja dengan target 10 dan terealisasi sebanyak 12 dokumen terdiri dari:
- a. Laporan Penyusunan Prosedur Penataan Arsip Digital di Lingkungan BPKP.
 - b. Laporan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan BPKP dan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPKP pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
 - c. Laporan analisis kebutuhan penyusunan SOP dari proses bisnis manajerial, utama, dan lainnya.
 - d. Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor KEP-272/SU/01/2021 tentang Tim Transformasi Prosedur Kerja di Lingkungan BPKP
 - e. Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor KEP-273/SU/01/2021 tentang Tim Penyusun Prosedur Kerja di Lingkungan Biro-Biro, Pusat-Pusat, dan Inspektorat.
 - f. Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor KEP-377/SU/01/2021 tentang Prosedur Baku Fungsi Tata Kelola Dalam Peta Proses Bisnis di Lingkungan BPKP.
 - g. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Soft Launching Aplikasi E-TOP dalam rangka Penataan Tata Kelola Pengawasan Secara Digital.
 - h. Draf Revisi Peraturan BPKP tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang saat ini telah dilakukan *circular letter* kepada Deputi Kepala BPKP.
 - i. Laporan Hasil Evaluasi, Inventarisasi, Pemetaan Pedoman Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dalam rangka Pengelolaan Pedoman di Lingkungan BPKP.
 - j. Draf Revisi Peraturan BPKP tentang Peta Proses Bisnis.

- k. Hasil Validasi Prosedur Kerja Deputi PPKD.
- l. Hasil Validasi Porsedur Kerja Pusbin JFA

5. Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi

Capaian kinerja output kegiatan layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja *output* kegiatan tersebut pada tahun 2021 adalah sebanyak satu atau mencapai 100% dari target tahun 2021 yang sebesar 1 layanan. *Output* tersebut dicapai dengan sebelas kegiatan Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi yang menghasilkan sebelas dokumen. Rincian *Output* kegiatan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Rincian *Output* Kegiatan

No	Indikator Output Kegiatan (IOK) (RKA/DIPA)	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	1	1	100%
2	Manajemen risiko	Dokumen	2	2	100%
3	Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	3	100%
4	Pembinaan APIP di lingkungan BPKP	Dokumen	3	3	100%
5	Pengembangan budaya organisasi	Dokumen	2	2	100%

Uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP
Realisasi sebanyak satu dokumen, yaitu Laporan Pengumpulan Data Komponen Penetapan Tujuan dalam Rangka Persiapan Penilaian Maturitas SPIP BPKP Tahun 2020. Tingginya capaian *output* sebesar 100% karena urgensi kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mempersiapkan penilaian mandiri maturitas SPIP BPKP tahun 2021.
- 2) Manajemen risiko
Realisasi sebanyak dua dokumen, yaitu:
 - a. Laporan Pembuatan Paparan Tutorial dan Penjelasan Aplikasi Manajemen Risiko (BeWise)
 - b. Laporan Manajemen Risiko Sekretaris Utama Triwulan III Tahun 2021.

Tingginya capaian *output* sebesar 100% tersebut terjadi karena urgensi kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mempersiapkan penilaian mandiri maturitas SPIP BPKP tahun 2021, termasuk Manajemen Risiko Indeks.
- 3) Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Realisasi sebanyak tiga dokumen, yaitu:

- a. Laporan Pemantauan Unit Zona Integritas Menuju WBK dan implementasi Manajemen Risiko pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur;
- b. Laporan Pembahasan *Road Map* RB Tahun 2020-2024 dan Penentuan Tema RB Peningkatan Pelayanan Publik dengan Pusdiklatwas BPKP;
- c. Laporan Kegiatan FGD Pembahasan Lanjutan Evaluasi RB dan SAKIP BPKP Tahun 2020 di Hotel Mercure Cikini pada bulan April 2021.

Tingginya capaian *output* sebesar 100% karena diperlukan percepatan untuk penilaian RB semester I Tahun 2021.

4) **Pembinaan APIP di lingkungan BPKP**

Realisasi sebanyak tiga dokumen, yaitu:

- a. Laporan Kegiatan *Focus Group Discussion* Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi (Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks, dan Efektifitas Pencegahan Korupsi) di Pusdiklatwas BPKP.
- b. Laporan Kegiatan Pembahasan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP Tahun 2021 di Pusdiklatwas BPKP sesuai undangan Inspektur BPKP Nomor UND-941/IN/2021.
- c. Laporan Kegiatan *Focus Group Discussion* tentang Manajemen Risiko Index (MRI) sesuai Surat Undangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor S-1348/PW09/1/2021 Tanggal 7 Desember 2021 bersama Inspektorat di Hotel Harper MT Haryono, Jakarta.

5) **Pengembangan budaya organisasi**

Realisasi sebanyak dua dokumen, yaitu:

- a. Laporan Kegiatan Penyusunan Draf Perban Budaya Kerja BPKP di Pusdiklatwas BPKP.
- b. Laporan Analisis Laporan Budaya Kerja sampai Triwulan III Tahun 2021.

Capaian *output* sebesar 100% telah memenuhi target pelaksanaan pada triwulan III.

6. Koordinasi Kebijakan Pengawasan Nasional Dengan APIP dan Lainnya

Hasil koordinasi kebijakan pengawasan nasional adalah dokumen jakwasnas BPKP yang ditetapkan pada triwulan ke IV Tahun 2021.

7. Koordinasi atas Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengawasan

Hasil koordinasi atas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan koordinasi dalam rangka penetapan dan identifikasi fokus pemerintah.
- b. Laporan Koordinasi dalam rangka penetapan rangkaian informasi hasil pengawasan yang akan disajikan kepada *stakeholders* (Presiden).
- c. Laporan Koordinasi dalam rangka penetapan metodologi pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai dengan jakwasnas dan tujuan organisasi.
- d. Laporan Koordinasi dalam rangka perencanaan konvergensi pengawasan.

8. Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan

Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan direktorat perencanaan (PAEP) dan unit rendal kedeputian dengan 4 (empat) hasil laporan koordinasi, yaitu satu kegiatan koordinasi setiap triwulan. Sampai dengan triwulan IV, capaian *output* adalah sejumlah 4 (empat) laporan koordinasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Koordinasi perencanaan pengawasan BPKP Tahun 2022 yang melibatkan Bappenas. (Triwulan I).
- b. Laporan Koordinasi perencanaan atas telah diterbitkannya APP dan APPD, penyesuaian perencanaan *refocusing* anggaran tahun 2021 atas PC-PEN dan Anggaran Tambahan Belanja, serta penyusunan perencanaan BPKP Tahun 2022 atas pagu indikatif (Triwulan II).
- c. Laporan Koordinasi tentang pelaporan ikhtisar hasil pengawasan (Laporan Presiden) Triwulan III Tahun 2021 (Triwulan III).
- d. Laporan Koordinasi penyusunan perencanaan Tahun 2022 yang melibatkan seluruh unit kerja BPKP (Triwulan III).

9. Pengembangan Kapasitas APIP dan PKN

Laporan pengembangan Kapasitas APIP dan PKN adalah Laporan atas kegiatan *Center of Excellent* (CoE) dimana kegiatan ini merupakan kerja sama antara BPKP dengan Universitas-universitas di Indonesia yang dicapai pada Triwulan IV Tahun 2021.

10. Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan Pendekatan *E-Learning*

Jumlah Laporan ini merupakan laporan atas kegiatan pengadaan Laboratorium CAT (Triwulan I Tahun 2021) dan Laporan Kegiatan pengembangan *Integrated Talent Management System* (ITMS) pada Triwulan IV Tahun 2021.

11. Project Management and Supporting

Laporan ini merupakan laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Management Consultant* (PMC) yang mempunyai peran untuk bertanggung jawab dan bertugas untuk mengelola dan mengimplementasikan proyek, meliputi supervisi, monitoring, akunting, dan laporan konsolidasi proyek.

III. Penggunaan Dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Penggunaan Dana

Capaian penggunaan dana pada Biro MKOT tahun 2021 mencapai Rp19.234.167.452,00 yang terdiri dari realisasi anggaran rutin/reguler sebesar Rp5.973.242.024,00 dan realisasi dana STAR sebesar Rp13.260.925.428,00. Nilai tersebut merupakan 82,19% dari total pagu anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp23.401.908.000,00, yang terdiri dari capaian anggaran rutin sebesar 97,91% dan dana star 76,65%. Rincian penggunaan dana kegiatan pada Biro MKOT tahun 2021 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Penggunaan Dana Pada Biro MKOT Tahun 2021

Rincian Output (RO)	Dana		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Layanan Perkantoran Biro MKOT	100.000.000	37.056.250	37,06
Layanan Perencanaan	820.244.000	791.824.874	96,54
Layanan Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi	464.000.000	461.187.700	99,39
Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	403.974.000	403.828.251	99,96
Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi	381.026.000	378.829.759	99,42
Koordinasi Kebijakan Pengawasan Nasional dengan APIP dan Lainnya	2.330.338.000	2.316.198.167	99,39
Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengawasan			
Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	1.601.310.000	1.584.317.023	98,94
Sub Jumlah	6.100.892.000	5.973.242.024	97,91
Pengembangan Kapasitas APIP dan PKN	2.211.362.000	136.511.363	6,17
Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan Pendekatan <i>E-Learning</i>	5.130.193.000	3.165.071.353	61,69
<i>Project Management and Supporting</i>	9.959.461.000	9.959.342.712	100,00
Sub Jumlah Pengawasan dan STAR	17.301.016.000	13.260.925.428	76,65
Jumlah	23.401.908.000	19.234.167.452	82,19

Rendahnya penyerapan dana tahun 2021 dibandingkan target karena hal-hal berikut:

- Realisasi anggaran layanan perkantoran Biro MKOT rendah karena masih minimnya belanja operasional dan pemeliharaan kantor selama masa pandemi.

- Terdapat kegiatan pengembangan Kapasitas APIP dan PKN yang belum dapat direalisasikan. Kegiatan tersebut berupa pengembangan *Center of Excellence* yang didalamnya terdapat anggaran untuk penelitian (*join research*) dengan 6 Perguruan Tinggi. Kegiatan ini rencananya akan diluncurkan ke tahun anggaran 2022.
- Terdapat anggaran pada Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan pendekatan *E-learning* untuk konsultan pengembang aplikasi yang masih dalam proses pengajuan persetujuan ADB. Kegiatan ini akan akan diluncurkan ke tahun 2022.

2. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian penggunaan SDM pada Biro MKOT tahun 2021 adalah sebesar 96,65%, yang terdiri dari capaian kegiatan rutin Biro MKOT sebesar 97,83% dan kegiatan STAR sebesar 92,61%. Realisasi penggunaan SDM pada Biro MKOT tahun 2021 adalah sebesar 33.974 OH atau 96,65% dari target sebesar 35.151 OH. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi kegiatan rutin Biro MKOT sebesar 26.610 OH atau 97,83% dari target yang sebesar 27.199 OH serta realisasi kegiatan STAR sebesar 7.364 OH atau 92,61% dari target yang sebesar 7.952 OH. Rincian realisasi penggunaan SDM tahun 2021 pada Biro MKO disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Penggunaan SDM Pada Biro MKOT Tahun 2021

No.	Rincian Output (RO)	SDM		
		Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1	Layanan Perkantoran Biro MKOT	4.410	3.310	75,06
2	Layanan Perencanaan	5.685	6.820	119,96
3	Layanan Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi	5.259	4.923	93,61
4	Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	4.800	4.919	102,48
5	Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi	5.100	4.842	94,94
6	Koordinasi Kebijakan Pengawasan Nasional dengan APIP dan	965	925	95,85
7	Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengawasan			
8	Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	980	871	88,88
	Sub Jumlah	27.199	26.610	97,83
1	Pengembangan Kapasitas APIP dan PKN	226	213	94,25
2	Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	439	415	94,53
3	Project Management and Supporting	7.287	6.736	92,44
	Sub Jumlah STAR	7.952	7.364	92,61
	Jumlah	35.151	33.974	96,65

Masih rendahnya penggunaan SDM (OH) pada tahun 2021 karena beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dalam kondisi pandemi.

3. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM

Secara umum, penggunaan dana sudah efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan Biro MKOT pada tahun 2021 yang rata-rata sebesar 100,81% didukung oleh penggunaan dana yang sebesar 82,19%. Penggunaan SDM juga sudah efisien. Hal tersebut ditunjukkan oleh rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Biro MKOT yang sebesar 100,81% didukung oleh penggunaan SDM sebesar 96,65%. Hal tersebut menunjukkan komitmen pegawai untuk tetap berkinerja walaupun dalam kondisi pandemi.

IV. Kinerja Lainnya

1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan pengawasan APP sebagai bahan pendukung Lappres.
2. Penyiapan Data Dukung dan Input Laporan P4GN dalam Aplikasi Periode Semester I Tahun 2021.
3. Pelayanan Studi Banding manajemen risiko dari Otoritas Jasa keuangan, Sekretariat Negara, dan Balai Harta Peninggalan Jakarta.
4. Pelayanan Studi Banding reformasi birokrasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. Pembuatan Video *Microlearning* Manajemen Perubahan pada Pusdiklatwas BPKP.
6. Pelayanan sebagai narasumber manajemen perubahan pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
7. Pelayanan Studi Banding reformasi birokrasi dari Ombudsman RI.
8. Konsultasi Penyusunan Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko pada K/L/P/BU ke Inspektorat Kementerian Keuangan.
9. Identifikasi Kebutuhan Data Dukungan Kapabilitas APiP dalam Rangka Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Risiko dan sebagai Konsep Bahan Ajar Diklat APiP di Pusdiklatwas BPKP.
10. Penyiapan Data Dukung dan Input Laporan P4GN dalam Aplikasi Periode Desember 2021.
11. Pemantauan pengisian sintesa hasil pengawasan APP TW4 tahun 2021 pada aplikasi SIMAX sebagai bahan penyusunan Laporan Presiden Tahun 2021.
12. Penyelenggaraan kegiatan raker BPKP pada tahun 2021.
13. Berkolaborasi dengan Bappenas, BPK dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, melakukan Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

V. Tindak Lanjut atas Rencana Aksi Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun 2021, telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh rencana aksi tahun 2020, yang meliputi:

1. Penjabaran secara jelas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro MKOT dan memperjelas bagian yang berperan dan bertanggung jawab atas setiap indikator kinerja terkait.
2. Penerbitan revisi perjanjian kinerja Biro MKOT tahun 2021.
3. Penyusunan kamus/profil indikator kinerja yang akurat dan *applicable* sebagai panduan dalam pengukuran kinerja, yang dicantumkan dalam aplikasi eSAKIP.
4. Sosialisasi target kinerja, kamus indikator dan rencana tindak tersebut di lingkungan unit kerja masing-masing dan kepada unit kerja lain agar mendapatkan masukan terkait pengukuran kinerja dan melakukan uji coba pengukuran kinerjanya, sehingga masing-masing penanggung jawab kinerja dapat memastikan bahwa *tools*, kriteria, mekanisme dan cara pencapaian kinerja dapat menghasilkan kinerja dalam mendukung kinerja pengawasan dan kinerja organisasi secara keseluruhan yang disampaikan melalui aplikasi zoom dan kunjungan langsung ke Unit Kerja.
5. Evaluasi intern serta perumusan strategi dan inovasi, termasuk rencana tindak oleh masing-masing penanggung jawab indikator kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan adalah:
 - Berkoordinasi dengan biro SDM dan Inspektorat BPKP untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi KemenPan.
 - Berkoordinasi dengan Inspektorat BPKP dalam rangka pemantauan unit kerja yang lolos pada tahap *desk evaluation* oleh TPN.
 - Melakukan evaluasi atas hasil penilaian TPN terhadap unit kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - Secara rutin melakukan identifikasi risiko pencapaian unit kerja memperoleh WBK/WBBM.
 - Berkoordinasi secara terus menerus dengan Inspektorat BPKP dalam rangka usulan unit kerja menuju WBK/WBBM.
 - Membuat aplikasi FORZA INTER sebagai tools pemantauan penyelenggaraan Zona Integritas unit kerja agar mempermudah Bagian SPIP RB dalam mendampingi unit kerja membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - Membuat SOP pemantauan, bimbingan teknis, asistensi, konsultasi Zona Integritas oleh Bagian SPIP RB kepada unit kerja.

- Melakukan sosialisasi survei pelayanan publik kepada seluruh unit kerja BPKP
 - Mengidentifikasi unit kerja BPKP yang melakukan pelayanan publik untuk didaftarkan pada SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik).
6. Mendorong pengembangan aplikasi e-SAKIP BPKP dalam upaya mempermudah dan memperlancar pengukuran, pemantauan serta pelaporan kinerja, dengan cara selalu berkoordinasi dengan Pusinfowas. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah:
- Berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan setiap penugasan dalam PKPT yang telah dilaksanakan, diinput dalam aplikasi SIMA yang terintegrasi dengan e-SAKIP. Dengan terinputnya setiap penugasan secara lengkap, diharapkan e-Sakip dapat menyajikan data kinerja secara akuntabel dan *realtime* sehingga lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan;
 - Penyusunan Format Pemantauan ABT yang dikembangkan pada aplikasi e-SAKIP BPKP;
 - Pengembangan fitur *Self Assessment* (SA) SAKIP dalam aplikasi e-sakip untuk memudahkan unit kerja mengetahui kualitas SAKIP nya, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan jika dianggap hasil SA SAKIP kurang bagus sebelum dilakukan penilaian oleh KemenPAN RB;
 - Pemantauan saldo penugasan pengawasan (PP) yang belum terlaksana berdasarkan Isu Prioritas melalui e-sakip;
 - Pengembangan fitur e-Perkin untuk memudahkan Unit Kerja dalam melakukan penyusunan Perkin.
7. Mempercepat realisasi kegiatan STAR *Advance* dengan:
- 1) PMU berkoordinasi intensif dengan seluruh tim teknis terkait penyusunan dan penyampaian TOR dan RAB Kegiatan STAR *Advance* Tahun 2021, termasuk kegiatan luncuran Tahun 2020.
 - 2) Menyiapkan surat pembatalan pengadaan Konsultan individu Learning Policy Expert. Kegiatan refinement kerangka kebijakan penyelenggaraan GIA Corpu akan diselenggarakan secara self-managed menggunakan pembiayaan dari Rupiah Murni; dan
 - 3) Melakukan perbaikan TOR dan RAB kegiatan Konsultan firma Learning Expert Team meliputi EOI dan komponen biaya konsultan (partial lumpsum contract). Selanjutnya, TOR dan RAB yang sudah diperbaiki akan disampaikan kepada PMU untuk dimintakan persetujuan ke ADB.
 - 4) Menyampaikan Request NOL ke ADB terkait penggantian Team Leader PMC dengan merujuk pada ADB guidelines (Project Administration Instructions dan Standard Request for Proposal).

Demikian Laporan Kinerja Biro MKOT Tahun 2021 kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Utama, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro,



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik

Setya Nugraha
NIP 196908091990031001